

# RENCANA KERJA ( RENJA )

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA  
KABUPATEN FLORES TIMUR



TAHUN ANGGARAN 2023



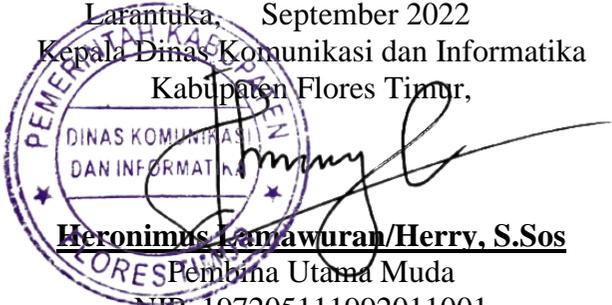
[www.diskominfo.florestimurkab.go.id](http://www.diskominfo.florestimurkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.. RENJA Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD Tahun 2023.

Rencana Kerja Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan satu tahun yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang disusun secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen RENJA Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah .

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

Larantuka, September 2022  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur,  
  
**Heronimus Lamawuran/Herry, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197205111992011001

## DAFTAR ISI

|  | Hal.      |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ii</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1    LATAR BELAKANG .....  | 1-2       |
| 1.2    LANDASAN HUKUM.....   | 3-5       |
| 1.3    MAKSUD DAN TUJUAN .....   | 5         |
| 1.4    SISTEMATIKA PENULISAN .....   | 5         |
| <b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN<br>CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH ..... | 6         |
| 2.2    ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....  | 7         |
| 2.3    ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....   | 8         |
| 2.4    REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....   | 9         |
| 2.5    PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....  | 10        |
| <b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>   | <b>13</b> |
| 3.1    TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....  | 13        |
| 3.2    TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DERAH .....  | 13        |
| 3.3    PROGRAM DAN KEGIATAN .....  | 14        |
| <b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>BAB IV : PENUTUP.....</b>   | <b>16</b> |



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
TAHUN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rancangan belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2023, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Renja PD Tahun 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

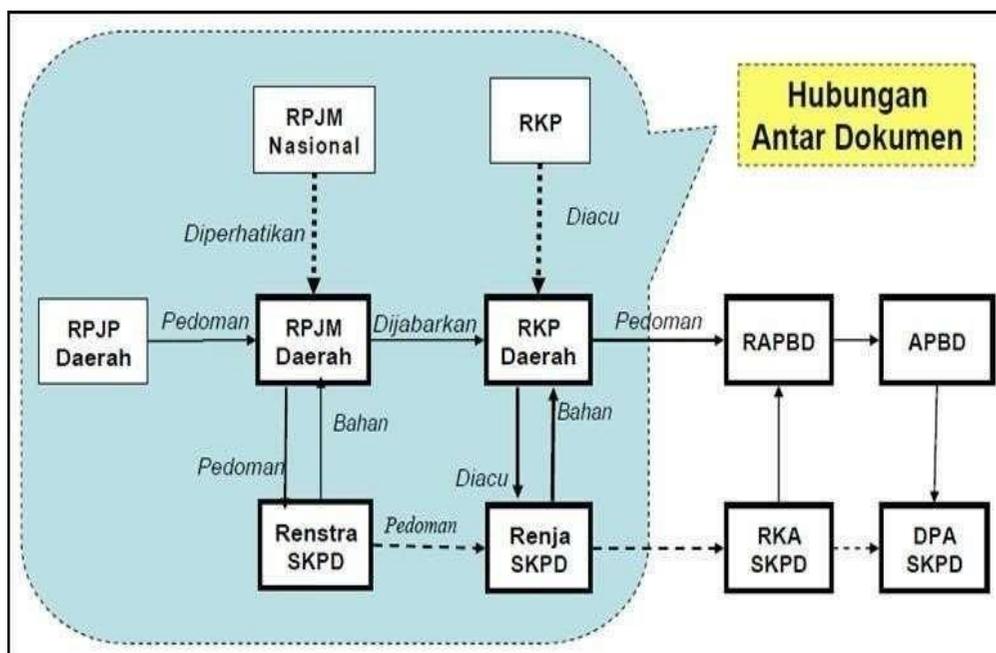
1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Nomor..... Tentang Pedoman

Penyempurnaan Rancangan Renja PD

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Selanjutnya Renja PD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah Tahun 2023. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;

Gambar1.1  
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
22. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen RENJA Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024.

#### **BAB VII PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Lalu sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d 2022**

| Kode Rekening | Usuran/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) sampai akhir periode (2022) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020          | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 |                    |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan |  |
|---------------|--|---|---|--|--|--------------------|-----------------------|---|--|--|
|               |  |   |   |  | Target Renja PD  | Realisasi Renja PD | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi capaian Program & Keg s/d Tahun Berjalan               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1             | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                  | 8.00                  | 9   | 10=5+7+9   | 10=10/4*100                                  |
| 2             |  | Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar |   |  |  |                    |                       |   |  |  |
| 2             | 16   | Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika                 |   |  |  |                    |                       |   |  |  |
| 2             | 16   | 01  | program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota/kota          | <i>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</i>                              | 100  | 100                | 100                   | 100   | 100  | 100.00                                       |
|               |  |   |   | <i>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</i>                                     | 100  | 100                | 100                   | 100   | 100  | 100.00                                       |
|               |  |   |   | <i>Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA</i>                      | 10   | 0                  | 2                     | 0   | 0  | 0.00   |
|               |  |   |   | <i>Jumlah Dokumen Pemencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD</i> | 35   | 21                 | 7                     | 7   | 35   | 100.00                                       |
|               |  |   |   |  |  |                    |                       |   |  |  |
| 2             | 16   | 01  | 2.01  | perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.                      |  |                    |                       |   |  |  |

|   |    |    |      |    |  |   |       |       |      |      |        |        |        |        |
|---|----|----|------|----|--|---|-------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 06 | koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( dok ) | 50    | 30    | 10   | 10   | 100.00 | 10     | 50     | 100.00 |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 |    | <b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>  |   |       |       |      |      |        |        |        |        |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | penyediaan gaji dan tunjangan ASN  | Jumlah gaji dan tunjangan ASN ( Kali )  | 70    | 42    | 14   | 14   | 100.00 | 14     | 70     | 100.00 |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 03 | pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                     | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan ( Bulan )  | 60    | 36    | 12   | 12   | 100.00 | 12     | 60     | 100.00 |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 |    | <b>Administrasi Kepegawian perangkat daerah</b>                                      |   |       |       |      |      |        |        |        |        |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                        | Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat formal /bimtek ( orang )                          | 10    | 0     | 2    | 0    | 0.00   | 0      | 0      | 0.00   |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 |    | <b>Admnistrasi umum perangkat daerah</b>   |   |       |       |      |      |        |        |        |        |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 01 | penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor                | Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor ( Bulan )                       | 60    | 36    | 12   | 12   | 100.00 | 12     | 60     | 100.00 |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor ( Unit )   | 15    | 0     | 3    | 0    | 0.00   | 3      | 3      | 20.00  |
|   |    |    |      |    |  | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor ( Unit )  | 10    | 6     | 6    | 0    | 0.00   | 0      | 6      | 60.00  |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | penyediaan bahan logistik kantor   | Tersedianya jasa kebersihan kantor ( Bulan )  | 60    | 36    | 12   | 12   | 100.00 | 0      | 48     | 80.00  |
|   |    |    |      |    |  | Tersedianya ATK ( Jenis )   | 60    | 36    | 12   | 12   | 100.00 | 12     | 60     | 100.00 |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan ( Lembar )                                     | 70640 | 11000 | 3000 | 4000 | 133.33 | 35,000 | 50,000 | 70.78  |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan                             | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan ( Jenis )                               | 60    | 36    | 12   | 12   | 100.00 | 12     | 60     | 100.00 |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas kunjungan tamu   | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu ( Dos )                                  | 4,125 | 890   | 650  | 650  | 100.00 | 825    | 2,365  | 57.33  |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                 | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ( Kali )  | 270   | 90    | 54   | 54   | 100.00 | 56     | 200    | 74.07  |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>              |   |       |       |      |      |        |        |        |        |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / atau Lapangan                                | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / atau Lapangan ( Unit )                          | 20    | 4     | 1    | 0    | 0.00   | 0      | 4      | 20.00  |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 |    | <b>penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                          |   |       |       |      |      |        |        |        |        |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | penyediaan jasa surat menyurat   | Tersedianya jasa surat menyurat ( Lembar )  | 60    | 36    | 12   | 12   | 100.00 | 12     | 60     | 100.00 |

|   |    |    |      |    |   |   |              |            |             |          |             |          |            |              |
|---|----|----|------|----|---|---|--------------|------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|--------------|
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik  | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ( Bulan )         | 60           | 36         | 12          | 12       | 100.00      | 12       | 60         | 100.00       |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | Tersedianya jasa tenaga pendukung teknis perkantoran ( Orang )            | 75           | 45         | 15          | 15       | 100.00      | 17       | 77         | 102.67       |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 |    | <b>pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                  |   |              |            |             |          |             |          |            |              |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan      | 20           | 12         | 4           | 4        | 100.00      | 4        | 20         | 100.00       |
|   |    |    |      |    |   | Terlaksananya Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional              | 5            | 3          | 1           | 1        | 100.00      | 1        | 5          | 100.00       |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 09 | pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor                            | 10           | 6          | 2           | 2        | 100.00      | 2        | 10         | 100.00       |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 11 | pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaran pendukung gedung kantor/bangunan lainnya                        | Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor       | 30           | 18         | 6           | 0        | 0.00        | 0        | 18         | 60.00        |
| 2 | 16 | 02 |      |    | <b>program informasi dan komunikasi public</b>  | <b>Cakupan layanan Informasi</b>  |              |            |             |          |             |          |            |              |
|   |    |    |      |    |   | <b>Jumlah Buku Informasi Pembangunan Daerah ( Buku )</b>                  | <b>250</b>   | <b>100</b> | <b>250</b>  | <b>0</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>40.00</b> |
|   |    |    |      |    |   | <b>Jumlah Peserta Penyebarluasan Informasi ( Peserta )</b>                | <b>1,000</b> | <b>200</b> | <b>1000</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>20.00</b> |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 |    | <b>pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota</b>                           |   |              |            |             |          |             |          |            |              |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 | Monitoring opini dan aspirasi publik  | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat ( Kec ) | 1.000        | 0          | 1000        | 0        | 0.00        | 0        | 0          | 0.00         |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | pengelolaan media komunikasi publik pelayanan informasi publik  | Optimalisasi peran RSPD ( Kecamatan )                                     | 95           | 57         | 19          | 19       | 100.00      | 19       | 95         | 100.00       |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 |   | Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah (Kecamatan)                   | 95           | 57         | 19          | 19       | 100.00      | 19       | 95         | 100.00       |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas   | Jumlah desa yang dibina menjadi desa digital ( Desa )                     | 19           | 8          | 8           | 0        | 0.00        | 0        | 8          | 42.11        |
| 2 | 16 | 03 |      |    | <b>program aplikasi informatika</b>   | <b>Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>         |              |            |             |          |             |          |            |              |

|   |    |    |      |    |  |   |        |        |      |      |        |       |        |        |
|---|----|----|------|----|--|---|--------|--------|------|------|--------|-------|--------|--------|
|   |    |    |      |    |  | Jumlah Komsosdes yang dibina (Kelompok)   | 19     | 8      | 8    | 0    | 0.00   | 0     | 8      | 42.11  |
|   |    |    |      |    |  | Jumlah Web OPD ( DPD/DESA)  | 74     | 20     | 33   | 33   | 100.00 | 21    | 74     | 100.00 |
|   |    |    |      |    |  | Jumlah Akses Internet ( Titik )   | 250    | 34     | 25   | 21   | 84.00  | 25    | 0      | 0.00   |
|   |    |    |      |    |  | Jumlah Jam Siaran RSPD ( Jam Siaran )   | 21.600 | 12,960 | 4320 | 3600 | 83.33  | 4,320 | 20,880 | 96.67  |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 |    |  | <b>pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah/kabupaten/kota</b> |        |        |      |      |        |       |        |        |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 02 |  | penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah/kabupaten/kota                    | 60     | 36     | 12   | 12   | 100.00 | 12    | 60     | 100.00 |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 03 |  | penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah   | 250    | 34     | 25   | 21   | 84.00  | 60    | 115    | 46.00  |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 |    |  | <b>pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</b>   |        |        |      |      |        |       |        |        |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03 |  | pengelolaan pusat data pemerintahan daerah data pemerintahan daerah   | 5      | 0      | 3    | 0    | 0.00   | 0     | 0      | 0.00   |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 10 |  | pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah   | 100    | 20     | 20   | 0    | 0.00   | 0     | 20     | 20.00  |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

| No | Indikator  | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |               |               |       | Realisasi Capaian |               | Proyeksi      |       | Catatan<br>Analisi                        |
|----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------------|---------------|---------------|-------|---|
|    |  |                             |     | Tahun<br>2021                   | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | 2024  | Tahun<br>2021     | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | 2024  |   |
| 1  | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan |                             | V   | 121.05                          | 131:58:00     | 142.11        | 0     | 0                 | 0             | 142.11        | 0     | Kegiatan hanya dilaksanakan di tahun 2022 |
| 2  | Presentase Lembaga yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Pemda       |                             | V   | 0                               | 18            | 20            | 20    | 0                 | 0             | 20            | 20    | Kegiatan hanya dilaksanakan di tahun 2023 |
| 3  | Cakupan layanan Telekomunikasi   |                             | V   | 0                               | 0             | 0             | 76.22 | 0                 | 0             | 0             | 76.22 | Kegiatan hanya dilaksanakan di tahun 2023 |

Berdasarkan Capaian Pelayanan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur terdapat 3 (tiga) Indikator Pelayanan Kinerja yang Mendukung Pencapaian Kinerja, pada Presentase lembaga yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Pemda Baru Mencapai 18 % atau sekitar 9 OPD

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika) maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur) Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi kunci keberhasilan Pembangunan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dalam perumusan perencanaan kerja dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Flores Timur dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya juga, menghadapi banyak Permasalahan baik yang datang dari dalam maupun dari luar di antaranya :

1. Pembangunan Jaringan Internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan public belum optimal

Berdasarkan permasalahan yang datang dari luar dan dari dalam yang menghambat keberhasilan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika , maka isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Empat tahun ke depan, adalah :

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Website oleh Oraganisasi Perangkat Daerah
2. Kuranya sarana dan prasarana pendukung pngembangan Akses Informasi dan Teknologi
3. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur 2023 adalah sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.4 Sebagai berikut:



Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Flores Timur

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN FLORES TIMUR

| No. | RANCANGAN RKPD AWAL   |        |   |                |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN  |        |   |                |                | Catatan Penting                                   |
|-----|---|--------|---|----------------|----------------|---|--------|---|----------------|----------------|---|
|     | Program/Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikator | Program/Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikator |   |
| 1   |   | 3      | 4   | 5              | 6              |   | 8      | 9   | 10             | 11             | 12  |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                 |        | <i>Prosentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</i>   | 100%           | 2,316,323,822  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                 |        | <i>Prosentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</i>   | 100%           | 2,651,358,850  |   |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |        | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)   | 100%           |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |        | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)   | 100%           |                |   |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | OPD    | Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (Dok)  | 4              | 10,000,000     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | OPD    | Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (Dok)  | 2              | 40,000,000     | Disesuaikan dengan Koordinasi dan Konsultasi      |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | OPD    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun (Dok)  | 4              | 20,000,000     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | OPD    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang disusun (Dok)  | 6              | 20,000,000     |   |
|     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | OPD    | Jumlah Evaluasi Kinerja PD yang disusun (Dok)   | 2              | 6,000,000      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | OPD    | Jumlah Evaluasi Kinerja PD yang disusun (Dok)   | 4              | 15,000,000     | Disesuaikan dengan Koordinasi dan Konsultasi      |
|     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |        | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)   | 100%           |                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |        | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)   | 100%           |                |   |
|     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | OPD    | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ( Bulan )  | 14             | 1,883,323,822  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | OPD    | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ( Bulan )  | 14             | 1,883,323,822  |   |
|     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | OPD    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD( Bulan )  | 12             | 25,000,000     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | OPD    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD( Bulan )  | 12             | 45,000,000     | Disesuaikan dengan jumlah pengelola keuangan SKPD |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | OPD    | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD(DOK) | 2              | 5,000,000      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | OPD    | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD(DOK) | 12             | 15,000,000     | Disesuaikan dengan jumlah dokumen yang dihasilkan |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |        | <i>Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</i>   | 100%           |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |        | <i>Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</i>   | 100%           |                |   |
|     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | OPD    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen)   | 2              | 5,000,000      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | OPD    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen)   | 2              | 15,000,000     | Disesuaikan dengan Koordinasi dan Konsultasi      |

|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                       | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%        |            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                       | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 100%        |             |  |
|--|---|-----------------------|--|-------------|------------|---|-----------------------|--|-------------|-------------|--|
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | OPD                   | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan(Paket) | 1           | 5,000,000  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | OPD                   | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan(Paket) | 1           | 15,000,000  | Penambahan intalasi listrik                        |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | OPD                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                | 1           | 25,000,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | OPD                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)                                | 1           | 20,000,000  |  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | OPD                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)   | 1           | 10,000,000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | OPD                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)   | 1           | 20,000,000  |  |
|  | Penyediaan bahan logistik   | OPD                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)  | 1           | 15,000,000 | Penyediaan bahan logistik   | OPD                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)  | 1           | 30,000,000  | Disesuaikan dengan Pagu 2022                       |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | OPD                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(paket)                                     | 1           | 15,000,000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | OPD                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(paket)                                     | 1           | 31,035,028  | Disesuaikan dengan Pagu 2022                       |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | OPD                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(dokumen)                | 2           | 2,000,000  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | OPD                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(dokumen)                | 2           | 2,000,000   |  |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | OPD                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)  | 1           | 15,000,000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | OPD                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)  | 1           | 30,000,000  | Disesuaikan dengan Pagu 2022                       |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Dalam dan Luar Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)                         | 1           | 15,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Dalam dan Luar Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)                         | 50          | 100,000,000 | Kebutuhan koordinasi tingkat provinsi maupun pusat |
|  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                       | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</b>                                     | <b>100%</b> |            | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                       | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</b>                                     | <b>100%</b> |             |  |
|  | Pengadaan Mebel   | OPD                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)   | 1           | 5,000,000  | Pengadaan Mebel   | OPD                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)   | 1           | 25,000,000  | Disesuaikan dengan kebutuhan akan meubel di OPD    |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | OPD                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)  | 1           | 15,000,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | OPD                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)  | 1           | 25,000,000  | Disesuaikan dengan kebutuhan akan Peralatan di OPD |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                       | <b>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>  | <b>100%</b> |            | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                       | <b>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>  | <b>100%</b> |             |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | OPD                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan ( Laporan )                            | 1           | 1,000,000  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | OPD                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan ( Laporan )                            | 12          | 1,000,000   |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | OPD                   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang di sediakan(Laporan)</i>  | 1           | 15,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | OPD                   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang di sediakan(Laporan)</i>  | 12          | 45,000,000  | Disesuaikan dengan Pagu 2022                       |

|          |   |           |   |              |                   |   |           |   |              |                    |   |
|----------|---|-----------|---|--------------|-------------------|---|-----------|---|--------------|--------------------|---|
|          | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | OPD       | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)  | 10           | 15,000,000        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | OPD       | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)  | 1            | 20,000,000         | Minimnya peralatan di OPD   |
|          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | OPD       | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Laporan)   | 15           | 144,000,000       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | OPD       | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Laporan)   | 12           | 144,000,000        |   |
|          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |           | <b>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>100%</b>  |                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |           | <b>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>100%</b>  |                    |   |
|          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | OPD       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)     | 4            | 15,000,000        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | OPD       | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)     | 4            | 45,000,000         | Disesuaikan dengan Pagu 2022  |
|          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | OPD       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)  | 10           | 15,000,000        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | OPD       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)  | 10           | 20,000,000         | Kenutuhan pemeliharaan Mesin dan peralatan di OPD                         |
|          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | OPD       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                   | 2            | 15,000,000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | OPD       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                   | 2            | 25,000,000         | 2 Gedung Kantor yang di rehab   |
|          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | OPD       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ( Unit ) | 2            | 20,000,000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | OPD       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ( Unit ) | 2            | 20,000,000         |   |
| <b>2</b> | <b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>  |           | <b>Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik ( % )</b>  | <b>40</b>    | <b>45,144,522</b> | <b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>  |           | <b>Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik ( % )</b>  | <b>40</b>    | <b>170,160,580</b> |   |
|          | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 |           | <b>Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik</b>   | <b>1,737</b> |                   | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 |           | <b>Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik</b>   | <b>1,737</b> |                    |   |
|          | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik   | Larantuka | Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik ( Dokumen )                | 1            | 5,016,058         | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik   | Larantuka | Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik ( Dokumen )                | 1            | 7,000,000          | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|          | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik  | 19 Kec    | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik( dokumen)   | 24           | 5,016,058         | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik  | 19 Kec    | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik( dokumen)   | 24           | 23,160,580         | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|          | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  | 19 Kec    | Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ( Dokumen )                       | 30           | 5,016,058         | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  | 19 Kec    | Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ( Dokumen )                       | 30           | 10,000,000         | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|          | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | 19 Kec    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)                                    | 1,152        | 5,016,058         | Pengelolaan Media Komunikasi Publik   | 19 Kec    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)                                    | 1,177        | 40,000,000         | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |

|   |  |           |  |        |            |  |           |  |        |             |   |
|---|--|-----------|--|--------|------------|--|-----------|--|--------|-------------|---|
|   | Pelayanan Informasi Publik   | 19 Kec    | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik(Dokumen)   | 493    | 5,016,058  | Pelayanan Informasi Publik   | 19 Kec    | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik(Dokumen)   | 493    | 20,000,000  | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|   | Layanan Hubungan Media   | 19 Kec    | Jumlah layanan hubungan media ( Layanan )  | 28     | 5,016,058  | Layanan Hubungan Media   | 19 Kec    | Jumlah layanan hubungan media ( Layanan )  | 28     | 20,000,000  | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|   | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | Larantuka | Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya ( Orang )   | 20     | 5,016,058  | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | Larantuka | Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya ( Orang )   | 20     | 20,000,000  | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|   | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | 19 Kec    | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kolompok Informasi Masyarakat(dokumen) | 11     | 5,016,058  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | 19 Kec    | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kolompok Informasi Masyarakat(dokumen) | 11     | 20,000,000  | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|   | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota           | Larantuka | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Paket )   | 1      | 5,016,058  | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota           | Larantuka | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Paket )   | 1      | 10,000,000  | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
| 3 | Program Aplikasi Informatika   |           | Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah   | 72,22% | 30,096,348 | Program Aplikasi Informatika   |           | Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah   | 72,22% | 370,096,343 |   |
|   | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |           | Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)                                      | 70     |            | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |           | Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)                                      | 70     |             |   |
|   | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa   | 19 Kec    | Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota ( Domain )  | 50     | 5,016,058  | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa   | 19 Kec    | Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota ( Domain )  | 50     | 15,096,343  | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|   | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | 19 Kec    | Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.(Dokumen)                            | 20     | 5,016,058  | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | 19 Kec    | Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.(Dokumen)                            | 20     | 145,000,000 | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |

|  |   |           |   |          |           |   |           |   |          |             |   |
|--|---|-----------|---|----------|-----------|---|-----------|---|----------|-------------|---|
|  | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                     | 19 Kec    | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah(Unit)                                | 30       | 5,016,058 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                     | 19 Kec    | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah(Unit)                                | 30       | 60,000,000  | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|  | <b>Pengelolaan e_government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |           | Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)                                 | <b>1</b> |           | <b>Pengelolaan e_government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |           | Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)                                 | <b>1</b> |             |   |
|  | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah                                    | Larantuka | <i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola(Unit)</i>                    | 1        | 5,016,058 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah                                    | Larantuka | <i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola(Unit)</i>                    | 1        | 25,000,000  | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|  | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                     | 19 Kec    | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i> | 1        | 5,016,058 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                     | 19 Kec    | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i> | 1        | 100,000,000 | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi                        | Larantuka | <i>Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>   | 4        | 5,016,058 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi                        | Larantuka | <i>Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>   | 4        | 25,000,000  | Pagu Indikatif awal yang sangat tidak bisa mendukung pelaksanaan kegiatan |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencana bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat maupun dari prangkat daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada prangkat daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan Musrenbang Kecamatan dari awal bulan Maret sampai dengan awal bulan April Tahun 2022 dengan lingkup 19 Kecamatan dan telah dilakukan forum OPD dan dilanjutkan dengan forum konsultasi publik Tahun 2022.

Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Flores Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika

| No | Program/Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja  | Besaran/ Volume | Catatan  |
|----|---|--------|--|-----------------|--|
| 1  | 2   | 3      | 4  | 5               | 6  |
| A  | <b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  |        |  |                 |  |
| 1  | <b>Program Aplikasi Informatika</b>   |        |  |                 |  |
|    | <b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |        | <b>Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)</b> | <b>70</b>       |  |
|    | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa  | 19 Kec | Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota ( Domain )  | 19 Kec          | Diterima dengan catatan ajukan permohonan ke Dinas Komunukasi dan informatika Kabupaten Flores Timur |
|    | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                    | 19 Kec | Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                       | 19 Kec          | Diterima dengan catatan ajukan permohonan ke Dinas Komunukasi dan informatika Kabupaten Flores Timur |

|  |   |        | Kabupaten/Kota.(Dokumen)                             |        |   |
|--|---|--------|--|--------|---|
|  | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 19 Kec | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah(Unit) | 19 Kec | Diterima dengan syarat ajukan proposal ke Bupati Flores Timur untuk selanjutnya di proses ke Kementerian KOMINFO RI |

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu terhadap pencapaian renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Yang diselaraskan dengan Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional yakni Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

**3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur**

| Tujuan   | Sasaran  | Indikator Sasaran  | Tahun Dasar | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- |
|--|--|--|-------------|---------------------------------------|
|  |  |  | 2021        | 2023                                  |
| Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur                                       | Meningkatkan Prosentase Jaringan Intra Pemerintah                  | Meningkatnya Prosentase Jaringan Intra Pemerintah                  | 68,03       | 72,22                                 |
| Meningkatnya Kualitasnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatkan Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik | Meningkatnya Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik | 18          | 40                                    |

**3.3 Program Dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah Tahun 2023 tersebut, maka dirumuskan program dan kegiatan Prioritas Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur sebagai berikut

Tabel 3.3

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Flores Timur

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN FLORES TIMUR

| KODE            | Urusan/ Bidang<br>Urusan/Program/ Kegiatan<br>/Sub Kegiatan  | Indikator<br>Kinerja Program /<br>Kegiatan   | Rencana Tahun 2023 (N) |                              |                                     |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024 (N+1) |                                     |
|-----------------|--|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--|-------------------------------------|
|                 |  |  | Lokasi                 | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target<br>Capaian                          | Kebutuhan<br>Dana/Pagu<br>Indikatif |
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)                    | (5)                          | (6)                                 | (7)            | (8)                | (9)  | (10)                                |
|                 | <b>PROGRAM PRIORITAS</b>   |  |                        |                              |                                     |                |                    |  |                                     |
| 2 16 02         | Program Informasi dan Komunikasi Publik  | Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik ( % )  |                        | 40                           | 170,160,580                         |                |                    | 40   | 185,491,310                         |
| 2 16 02 2.01    | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik   |                        | 1,737                        |                                     |                |                    | 2,137                                      |                                     |
| 2 16 02 2.01 01 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  | Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik ( Dokumen )   | Larantuka              | 1                            | 7,000,000                           | APBD II        |                    | 1  | 7,000,000                           |
| 2 16 02 2.01 02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik( dokumen)  | 19 Kec                 | 24                           | 23,160,580                          | APBD II        |                    | 36   | 25,000,000                          |
| 2 16 02 2.01 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ( Dokumen )  | 19 Kec                 | 30                           | 10,000,000                          | APBD II        |                    | 30   | 10,000,000                          |
| 2 16 02 2.01 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)   | 19 Kec                 | 1,177                        | 40,000,000                          | APBD II        |                    | 1,225                                      | 48,491,310                          |
| 2 16 02 2.01 06 | Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik(Dokumen)   | 19 Kec                 | 493                          | 20,000,000                          | APBD II        |                    | 833  | 25,000,000                          |
| 2 16 02 2.01 07 | Layanan Hubungan Media   | Jumlah layanan hubungan media ( Layanan )  | 19 Kec                 | 28                           | 20,000,000                          | APBD II        |                    | 28   | 20,000,000                          |
| 2 16 02 2.01 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya ( Orang )   | Larantuka              | 20                           | 20,000,000                          | APBD II        |                    | 20   | 20,000,000                          |
| 2 16 02 2.01 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kolompok Informasi Masyarakat(dokumen) | 19 Kec                 | 11                           | 20,000,000                          | APBD II        |                    | 11   | 20,000,000                          |
| 2 16 02 2.01 13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Paket )   | Larantuka              | 1                            | 10,000,000                          | APBD II        |                    | 1  | 10,000,000                          |
| 2 16 02         | Program Aplikasi Informatika   | Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah   |                        | 72,22%                       | 370,096,343                         |                |                    | 84,42%                                     | 322,494,782                         |
| 2 16 03 2.01    | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)                                      |                        | 70                           |                                     |                |                    | 70   |                                     |
| 2 16 03 2.01 01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa   | Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota ( Domain )  | 19 Kec                 | 50                           | 15,096,343                          | APBD II        |                    | 50   | 10,000,000                          |

|        |    |    |      |    |  |   |           |    |             |         |    |             |
|--------|----|----|------|----|--|---|-----------|----|-------------|---------|----|-------------|
| 2      | 16 | 03 | 2.01 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.(Dokumen) | 19 Kec    | 20 | 145,000,000 | APBD II | 20 | 122,494,782 |
| 2      | 16 | 03 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah(Unit)  | 19 Kec    | 30 | 60,000,000  | APBD II | 30 | 50,000,000  |
| 2      | 16 | 03 | 2.02 |    | <b>Pengelolaan e_government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)   |           | 1  |             |         | 1  |             |
| 2      | 16 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah   | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola(Unit)   | Larantuka | 1  | 25,000,000  | APBD II | 1  | 20,000,000  |
| 2      | 16 | 03 | 2.02 | 04 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | 19 Kec    | 1  | 100,000,000 | APBD II | 1  | 100,000,000 |
| 2      | 16 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi   | Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  | Larantuka | 4  | 25,000,000  |         | 4  | 20,000,000  |
| JUMLAH |    |    |      |    |  |   |           |    | 540,256,923 |         |    | 507,986,092 |

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan pada Daerah. Maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Flores Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

| KODE |    |    |      |    | URUSAN/ BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAH DAERAH<br>PROGRAM / KEGIATAN                            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM /<br>KEGIATAN   | TARGET JKINERJA DAN KERANGKA<br>PENDANAAN TAHUN 2023 |                   |        | PRIORITAS |    | PERKIRAAN TAHUN 2024 |                   |
|------|----|----|------|----|---|---|--|-------------------|--------|-----------|----|----------------------|-------------------|
|      |    |    |      |    |   |   | TARGE<br>T   | PAGU<br>INDIKATIF | LOKASI | PN        | PD | TARGE<br>T           | PAGU<br>INDIKATIF |
| 2    | 16 | 01 |      |    | Program Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                    | <i>Prosentase Pelayanan Adminstrasi<br/>Perkantoran</i>   | 100%   | 2,651,358,850     |        |           |    | 100%                 | 2,631,358,850     |
| 2    | 16 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Persentase Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah (%)   | 100%   |                   |        |           |    | 100%                 |                   |
| 2    | 16 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan PD<br>yang disusun (Dok)   | 2  | 40,000,000        | OPD    |           | PD | 2                    | 20,000,000        |
| 2    | 16 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD<br>yang disusun (Dok)   | 6  | 20,000,000        | OPD    |           | PD | 6                    | 20,000,000        |
| 2    | 16 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Evaluasi Kinerja PD yang<br>disusun (Dok)  | 4  | 15,000,000        | OPD    |           | PD | 4                    | 15,000,000        |
| 2    | 16 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah   | Persentase Perencanaan dan<br>Pelaporan Capaian Kinerja dan<br>Keuangan (%)   | 100%   |                   |        |           |    | 100%                 |                   |
| 2    | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN  | Tersedianya Gaji dan Tujungan ASN ( Bulan )   | 14   | 1,883,323,822     | OPD    |           | PD | 14                   | 1,883,323,822     |
| 2    | 16 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD( Bulan )   | 12   | 45,000,000        | OPD    |           | PD | 12                   | 45,000,000        |
| 2    | 16 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran<br>SKPD           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulan/ Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran<br>SKPD(DOK) | 12   | 15,000,000        | OPD    |           | PD | 12                   | 15,000,000        |
| 2    | 16 | 01 | 2.05 |    | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah  | <i>Persentase ASN yang memiliki<br/>kesesuaian kompetensi (%)</i>   | 100%   |                   |        |           |    | 100%                 |                   |
| 2    | 16 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian  | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi Kepegawaian(Dokumen)  | 2  | 15,000,000        | OPD    |           | PD | 2                    | 15,000,000        |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah   | <i>Prosentase Pelayanan Adminstrasi<br/>Perkantoran</i>   | 100%   |                   |        |           |    | 100%                 |                   |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor yang disediakan(Paket)  | 1  | 15,000,000        | OPD    |           | PD | 1                    | 15,000,000        |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)  | 1  | 20,000,000        | OPD    |           | PD | 1                    | 20,000,000        |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga<br>yang Disediakan(Paket)   | 1  | 20,000,000        | OPD    |           | PD | 1                    | 20,000,000        |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan bahan logistik   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor<br>yang Disediakan(Paket)  | 1  | 30,000,000        | OPD    |           | PD | 1                    | 30,000,000        |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan<br>Penggandaan yang Disediakan(paket)   | 1  | 31,035,028        | OPD    |           | PD | 1                    | 31,035,028        |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan yang<br>Disediakan(dokumen)   | 2  | 2,000,000         | OPD    |           | PD | 2                    | 2,000,000         |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 07 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu(Laporan)  | 1  | 30,000,000        | OPD    |           | PD | 1                    | 30,000,000        |

|   |    |    |      |    |  |  |                |                    |                       |  |                |                    |
|---|----|----|------|----|--|--|----------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|--------------------|
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 08 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)   | 50             | 100,000,000        | Dalam dan Luar Daerah |  | 50             | 100,000,000        |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</b>   | <b>100%</b>    |                    |                       |  | <b>100%</b>    |                    |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)   | 1              | 25,000,000         | OPD                   |  | 1              | 25,000,000         |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)  | 1              | 25,000,000         | OPD                   |  | 1              | 25,000,000         |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>  | <b>100%</b>    |                    |                       |  | <b>100%</b>    |                    |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan ( Laporan )  | 12             | 1,000,000          | OPD                   |  | 12             | 1,000,000          |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang di sediakan(Laporan)</i>  | 12             | 45,000,000         | OPD                   |  | 12             | 45,000,000         |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)   | 1              | 20,000,000         | OPD                   |  | 1              | 20,000,000         |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | <i>Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Laporan)</i>   | 12             | 144,000,000        | OPD                   |  | 12             | 144,000,000        |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>100%</b>    |                    |                       |  | <b>100%</b>    |                    |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>   | 4              | 45,000,000         | OPD                   |  | 4              | 45,000,000         |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)</i>  | 10             | 20,000,000         | OPD                   |  | 10             | 20,000,000         |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)  | 2              | 25,000,000         | OPD                   |  | 2              | 25,000,000         |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi ( Unit )  | 2              | 20,000,000         | OPD                   |  | 2              | 20,000,000         |
| 2 | 16 | 02 |      |    | <b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>   | <b>Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik ( % )</b>   | <b>40</b>      | <b>170,160,580</b> |                       |  | <b>40</b>      | <b>185,491,310</b> |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 |    | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik</b>  | <b>1,737</b>   |                    |                       |  | <b>2,137</b>   |                    |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  | Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik ( Dokumen )   | 1              | 7,000,000          | Larantuka             |  | 1              | 7,000,000          |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik( dokumen)  | 24             | 23,160,580         | 19 Kec                |  | 36             | 25,000,000         |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik ( Dokumen )  | 30             | 10,000,000         | 19 Kec                |  | 30             | 10,000,000         |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)   | 1,177          | 40,000,000         | 19 Kec                |  | 1,225          | 48,491,310         |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik(Dokumen)   | 493            | 20,000,000         | 19 Kec                |  | 833            | 25,000,000         |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media   | Jumlah layanan hubungan media ( Layanan )  | 28             | 20,000,000         | 19 Kec                |  | 28             | 20,000,000         |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya ( Orang )   | 20             | 20,000,000         | Larantuka             |  | 20             | 20,000,000         |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kolompok Informasi Masyarakat(dokumen) | 11             | 20,000,000         | 19 Kec                |  | 11             | 20,000,000         |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Paket )   | 1              | 10,000,000         | Larantuka             |  | 1              | 10,000,000         |
| 2 | 16 | 02 |      |    | <b>Program Aplikasi Informatika</b>  | <b>Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah</b>  | <b>72,22 %</b> | <b>370,096,343</b> |                       |  | <b>84,42 %</b> | <b>322,494,782</b> |

|   |    |    |      |    |   |   |    |             |            |  |    |    |             |
|---|----|----|------|----|---|---|----|-------------|------------|--|----|----|-------------|
| 2 | 16 | 03 | 2.01 |    | <b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)</b>    | 70 |             |            |  |    | 70 |             |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa  | Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota ( Domain )   | 50 | 15,096,343  | 19 Kec     |  | PD | 50 | 10,000,000  |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.(Dokumen) | 20 | 145,000,000 | 19 Kec     |  | PD | 20 | 122,494,782 |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah(Unit)  | 30 | 60,000,000  | 19 Kec     |  | PD | 30 | 50,000,000  |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 |    | <b>Pengelolaan e_government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)   | 1  |             |            |  |    | 1  |             |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah  | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola(Unit)   | 1  | 25,000,000  | Larant uka |  | PD | 1  | 20,000,000  |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 04 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | 1  | 100,000,000 | 19 Kec     |  | PD | 1  | 100,000,000 |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi  | Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  | 4  | 25,000,000  | Larant uka |  | PD | 4  | 20,000,000  |

## **BAB V. PENUTUP**

RENJA Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENJA Tahun 2023 melalui pelaksanaan program, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RENJA Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RENJA;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang termuat dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKA) Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RENJA ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RENJA Tahun 2023 ini.

Demikian RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.

Larantuka, September 2022  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Flores Timur,



**Heronimus Lamawuran/Herry, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197205111992011001

